

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II :  
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (BELANJA INFRASTRUKTUR, BELANJA  
MODAL, BARANG JASA DAN MODAL)  
DAN  
PEMERIKSAAN KINERJA (UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AKSES AIR  
BERSIH BERBASIS MASYARAKAT YANG LAYAK DAN BERKELANJUTAN)  
TA 2014 DAN SEMESTER I 2015**

Semarang, **Senin (7 Desember 2015)** – Hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan acara **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Belanja Infrastruktur, Belanja Modal, Barang Jasa Dan Modal) Dan Pemeriksaan Kinerja (Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat Yang Layak Dan Berkelanjutan) TA 2014 Dan Semester I 2015**. Dalam acara penyerahan ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.I.A., C.F.E menyerahkan sebanyak 12 LHP. Ada pun 12 LHP tersebut diserahkan kepada Provinsi Jateng, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kota Tegal, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonogiri.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menjelaskan hal-hal yang masih menjadi sorotan dalam belanja infrastruktur dan belanja modal adalah sebagai berikut pelaksanaan pengumuman RUP tidak tertib, dimana terdapat pekerjaan dari dana APBD/BLUD tidak masuk ke dalam portal SiRUP, SOP penyusunan dan pengumuman RUP belum dibuat, penyusunan KAK belum seluruhnya dilaksanakan, pengumuman RUP tidak dimuat di laman (website) resmi Pemda; Penyusunan HPS tidak sesuai Ketentuan Perpres No 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Pengelolaan administrasi kegiatan belum memadai, Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ada pun dalam Belanja Barang dan Jasa terdapat hal-hal yang menjadi sorotan, yaitu pengeluaran yang membebani keuangan daerah, dan terdapat pengeluaran yang digunakan tidak untuk keperluan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Dalam pemeriksaan kinerja untuk menilai upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah **belum optimal** melakukan upaya penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan kembali mengingatkan tentang hal-hal terkait batasan-batasan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Pada akhir sambutannya, Kepala Perwakilan menginformasikan rencana pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.